

0Strategi Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Pemula Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati 2018 Di Kabupaten Pinrang

Dewi Sri Lestari^{1*}, Ruskin Azikin², Samsir Rahim³

- 1) Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Unismuh Makassar, Indonesia
- 2) Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Unismuh Makassar, Indonesia
- 3) Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Unismuh Makassar, Indonesia

Abstract

This study purposed to describe how the the general election commission strategy in increasing the political participation of novice voters in the election of Regent and Vice of Regent in Pinrang Regency, 2018. This study used the Salusu theory. The method was descriptive qualitative research. The results of this study showed that the strategy used to increase the political participation of novice voters in the election commission in collaboration with democratic volunteers and several other community organizations in conducting socialization activities to improve performance even though it was not done routinely, socialization was three segment of society including high school student, student and the general public in accordance with the methods used, as well as utilizing electronic media and internet media. The determinant factor why novice voters did not participate in voting were daily activities, the influence of the family environment, and feelings of inadequacy.

Keyword: *community participation, strategy, novice voters.*

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan bagaimana strategi komisi pemilihan umum dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2018 di Kabupaten Pinrang. Penelitian ini menggunakan teori Salusu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi yang digunakan untuk meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2018 yaitu komisi pemilihan umum bekerja sama dengan relawan demokrasi dan beberapa organisasi masyarakat lainnya dalam melakukan sosialisasi, memberikan bimbingan teknis dan pelatihan kepada setiap panitia yang terlibat dalam kegiatan sosialisasi untuk meningkatkan kinerja meskipun tidak dilakukan secara rutin, sosialisasi kepada tiga segmen masyarakat diantaranya anak SMA, Mahasiswa dan Masyarakat umum sesuai dengan metode yang digunakan, serta memanfaatkan media elektronik dan media internet. Faktor determinan sehingga pemilih pemula tidak ikut dalam memilih yaitu kegiatan sehari-hari, pengaruh dari lingkungan keluarga, dan perasaan tidak mampu.

Kata Kunci: partisipasi masyarakat, strategi, pemilih pemulah

* dewisrilestari@gmail.com

PENDAHULUAN

Berbicara mengenai demokrasi di Indonesia, maka pasti akan berkaitan dengan pemilihan umum. Salah satu indikator suksesnya suatu penyelenggaraan pemilihan umum adalah partisipasi politik masyarakat yang diwujudkan dalam hak pemberian hak suara yang dimiliki oleh masyarakat yang telah memiliki hak pilih pada pemilihan umum tersebut.

Indonesia merupakan Negara yang menggunakan system demokrasi yang kesuksesan pemerintahannya berasal dari rakyat. Berdasarkan tugas KPU dalam Undang- undang Nomor 22 tahun 2007 pasal 8 (1) mengenai tugas, wewenang, dan kewajiban komisi pemilihan umum bahwa KPU mempunyai tugas menyelenggarakan sosialisasi, penyelenggaraan sosialisasi penyelenggaraan pemilu atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat oleh karena itu untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilu maka KPU Pinrang sebagai penyelenggara mempunyai tanggung jawab besar untuk mengsucceskan pemilu tersebut demi terlaksananya pemilu yang optimal, jujur dan adil. Sehingga KPU Pinrang harus memiliki strategi untuk meningkatkan partisipasi pemilih terutama dikalangan

pemilih pemula strategi tersebut biasa berupa sosialisasi atau pendidikan politik.

Sosialisasi pemilu dapat dijadikan sebagai sarana pendidikan politik untuk mewujudkan partisipasi politik masyarakat yang berkualitas. Masyarakat yang menggunakan hak pilihnya sesuai dengan nalar serta hati nuraninya tanpa mendapat intervensi dari pihak manapun.

Untuk melaksanakan pemilihan umum, KPU dan KPU kabupaten/kota mempunyai tugas dan wewenang diantaranya: a) Merencanakan, memimpin dan melaksanakan seluruh tahapan kegiatan pemilihan umum, sebagaimana di tentukan dalam perundang-undangan yang berlaku b) Membentuk, memberi arahan dan mengkoordinasikan organisasi pelaksanaan pemilihan umum ditingkat provinsi, dan kabupaten/kota, serta panitia pemilihan luar negeri (PPLN) c) Menyusun dan menetapkan tata cara serta tata laksana pemilihan umum sebagai penjabaran teknis peraturan perundang-undangan d) Merencanakan, memimpin, dan menyelenggarakan pengadaan dan pendistribusian logistic pelaksanaan pemilihan umum e) Mengumpulkan, mensistematisasi,

mengelolah dan mempublikasikan bahan serta data hasil pemilihan umum.

Dalam penyelenggaraan pemilu partisipasi masyarakat merupakan aspek yang sangat penting sehingga KPU perlu menggunakan strategi terkhusus untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan (Glako, dkk, 2017)

Strategi merupakan sebuah langkah yang dilakukan oleh individu atau organisasi dalam proses pencapaian tujuannya dengan mengambil langkah-langkah seperti menentukan tujuan dan sasaran jangka panjang, penggunaan serangkaian tindakan serta pengelolaan sumber daya yang diperlukan untuk jangka panjang, penggunaan serangkaian tindakan serta pengelolaan sumber daya untuk yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut (Salusu 2015:64).

Pendapat lain dikemukakan oleh Effendi (2016:32) strategi merupakan perencanaan atau planning dan manajemen untuk mencapai suatu tujuan yang hanya dapat dicapai menggunakan taktik operasional.

Strategi juga dapat diartikan sebagai suatu proses untuk mencapai tujuan berdasarkan kekuatan yang telah direncanakan sebelumnya dan waktu

yang telah ditentukan (Agung Nugroho 2018).

Komisi pemilihan umum sebagai lembaga Negara yang mempunyai tugas utama menyelenggarakan pemilu terus berupaya agar pemilu dapat berjalan dengan baik dan benar. Ukuran keberhasilan pemilu dianggap sukses besar jika pelaksanaannya berjalan *luber* (langsung, umum, bebas, rahasia) serta *jurdil* (jujur dan adil) dan tingkat partisipasi tinggi.

Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok, dimana orang ikut serta aktif dalam kehidupan politik, misalnya ikut pemilu, mempengaruhi pengambilan keputusan, dan ikut partai politik (Kaelola 2009).

(Supriyono 2014:39) keikutsertaan masyarakat (partisipasi) dalam pemilu merupakan salah satu bentuk untuk mempengaruhi keputusan proses politik berupa pemilihan calon pemimpin.

Partisipasi politik merupakan aspek penting dalam sebuah tatanan Negara demokrasi sekaligus merupakan ciri khas adanya modernisasi politik. Modernisasi politik dapat berkaitan dengan aspek politik dan pemerintah partisipasi politik pada dasarnya merupakan kegiatan yang dilakukan warga negara untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan

dengan tujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah.

partisipasi merupakan berbagai corak tindakan massa maupun individual yang memperlihatkan adanya hubungan timbal balik antara pemerintah dan warganya.(Erfiza 2012:151)

Samuel P. Huntington dan Joan Nelson (1990). Membatasi pengetahuan partisipasi mereka tentang partisipasi politik pada beberapa hal Pertama mencakup berbagai kegiatan-kegiatan politik dan bukan sikap-sikap maksudnya seperti bagaimana berbagai sikap dan perasaan tersebut berkaitan dengan berbentuk tindakan politik , kedua yang dimaksud dalam partisipasi politik itu adalah warga Negara preman (biasa), bukan pejabat-pejabat pemerintah yang mempunyai pekerjaan yang professional di bidang itu, padahal justru kajian ini pada warga Negara biasa, ketiga kegiatan yang dimaksudkan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan keputusan pemerintah kegiatan yang dimaksud misalnya membujuk atau menekan pejabat pemerintah untuk bertindak dengan cara-cara tertentu untuk mengagalkan keputusan, keempat mencakup seluruh aktivitas yang ditujukan agar pemerintah terpengaruh, tanpa mempedulikan hasil

kedepannya atau ada tidaknya efek yang dihasilkan, kelima partisipasi politik berupa kegiatan mempengaruhi pemerintah yang dilakukan langsung atau tidak langsung.

Dari beberapa pengertian mengenai partisipasi politik diatas maka dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan partisipasi politik adalah keterlibatan individu atau kelompok sebagai warga Negara dalam proses politik yang berupa kegiatan yang positif dan dapat juga berupa kegiatan yang negatif yang bertujuan untuk berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan politik dalam rangka mempengaruhi kebijakan pemerintah.

Ramlan Surbakti (2007 :144) membedakan tipe partisipasi masyarakat kedalam empat macam diantaranya: (a) partisipasi aktif (b) partisipasi Militan-Radikal (c) Partisipasi pasif (d) partisipasi apatis.

Kelompok pemilih pemula ini juga biasanya berstatus pelajar, Mahasiswa, serta pekerja muda yaitu mereka masih memerlukan pembinaan dan pengembangan kearah pertumbuhan potensi dan kemampuannya keningkat yang optimal agar dapat berperan dalam bidang politik.

Karakteristik pemilih pemula dalam (Firman 2014) mengemukakan bahawa (a) belum pernah memilih atau melakukan penentuan suara di dalam TPS belum memiliki pengalaman memilih, (b) memiliki antusiasme yang tinggi, (c) kurang rasional, (d) pemilih pemula yang masih penuh gejolak dan semangat yang apabila tidak dikendalikan akan memiliki efek terhadap konflik-konflik sosial di dalam pemilu, (e) memiliki rasa ingin tahu, mencoba dan berpartisipasi dalam pemilu meskipun kadang dengan latar belakang yang berbeda.

Dalam hal ini sukses atau tidaknya pemilihan umum di Indonesia ditentukan oleh strategi yang digunakan dan turut pula dipengaruhi oleh kinerja dari komisi pemilihan umum sendiri. Maka dari itu komisi pemilihan umum diharapkan mampu memberikan suatu perubahan yang baik dan tepat.

Di Indonesia Negara-negara maju dalam usia pemilih pemula disebut sebagai masyarakat yang sudah matang secara psikologis dan pada kenyataan di Negara-negara berkembang (termasuk Indonesia) masih sangat banyak remaja (bahkan orang dewasa) yang belum mampu sepenuhnya mencapai kematangan secara psikologis. sehingga emosinya masih kurang stabil

dan masih mudah terpengaruh dan goyah pendiriannya.

Karena bagi partai politik tentu harus memberikan peranan penyadaran terhadap para pemilih pemula untuk berpartisipasi dalam pemilu. alasan dibalik niat mencoblos para pemilih pemula adalah pemikiran bahwa apapun hasil pemilu akan berdampak juga bagi kehidupan mereka, baik langsung maupun tidak langsung, sehingga lebih baik ikut memberikan suara.

Berdasarkan apa yang telah diutarakan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ Strategi Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Pemula Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 di Kabupaten Pinrang”

METODE PENELITIAN

Waktu penelitian direncanakan selama bulan Juni s/d Agustus 2019. Jenis penelitian yang digunakan penulis yaitu pendekatan kualitatif yaitu suatu penelitian yang diperoleh melalui hasil pengumpulan data dari latar alami sebagai sumber dengan instrumen itu. Dengan tipe penelitian *fenomenologi*, yaitu suatu penelitian yang dilakukan melalui pemaparan dan pengalaman yang dialami oleh informan dengan

dukungan data kualitatif. Untuk kebutuhan pengumpulan data, peneliti melakukan pengumpulan data primer yaitu data yang diperoleh melalui hasil wawancara dan data sekunder yaitu data yang dapat diperoleh dari sebuah pihak kedua, ketiga dan seterusnya. Adapun yang menjadi informan pada penelitian ini adalah Ketua KPU Kabupaten Pinrang, Komisioner Divisi Sosialisasi Partisipasi Masyarakat dan SDM, Anggota Teknis dan Hubungan Masyarakat serta Masyarakat Pemilih Pemula. Dalam pengumpulan data digunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam menganalisis data yang digunakan reduksi data dan penarikan kesimpulan, sedangkan untuk data yang digunakan triangulasi yaitu, triangulasi sumber, triangulasi waktu, dan triangulasi teknik.

HASIL DAN PENELITIAN

Kabupaten Pinrang merupakan salah satu Daerah Kabupaten di provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Kabupaten ini terletak 185 km dari Makassar arah utara yang berbatasan dengan Kabupaten Polowali Mandar Provinsi Sulawesi Barat, Kabupaten Pinrang memiliki luas wilayah 1.961,77 km² dan Penduduk yang terbagi ke dalam 12 Kecamatan, meliputi 68 desa, dengan jumlah penduduk sebanyak ±258.822.

Pemilihan nama Pinrang sebagai nama wilayah dikarenakan daerah Pinrang merupakan tempat perkumpulan ke empat raja tadi dan sekaligus tempat berdirinya kantor onder afdelingeen (kantor residen). Kemudian Onder afdeling Pinrang ini, pada Zaman pendudukan Jepang menjadi Bunken Kanrika Pinrang, kemudian pada zaman kemerdekaan pada akhirnya menjadi Kabupaten Pinrang.

KPU merupakan lembaga yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Hal ini tercantum dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945 dan UU tentang pemilu. Seluruh anggota KPU dan perangkat pendukungnya harus lebih menyadari bahwa pemilu yang lalu harus lebih berkualitas dari pemilu yang akan datang. Oleh karena itu KPU harus mampu menyelenggarakan pemilu dengan tetap mengedepankan pencapaian asas-asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil serta beradab.

Pembentukan KPU yang demikian tidak bisa dilepaskan dengan aktivitas KPU masa lalu, yaitu pada pemilu 1999. Pada saat itu KPU beranggotakan para fungsional partai peserta pemilu, dalam perjalanan KPU saat itu, public melihat secara jelas bagaimana sangat kuatnya unsur kepentingan (interens) mearnai setiap kegiatan KPU, sehingga sangat

sering di bahas dalam pembahasan keputusan-keputusan KPU yang harus menghadapi situasi deadlock. Hal ini tentu tidaklah menggembirakan, khususnya dilihat dari sudut pengembangan Citra dan pengembangan KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu. Atas dasar pemikiran bahwa KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu seharusnya bersih dan intervensi partai politik dan pemerintah, maka DPR bersama pemerintah mengeluarkan UU No. 4 Tahun 2000 yang secara tegas menyatakan bahwa anggota KPU terdiri dari orang-orang independen dan nonpartisan.

Sifat independen dan nonpartisan KPU saat ini tercermin dari proses seleksi calon anggota KPU. Dari semua calon anggota KPU yang diajukan Presiden kepada DPR untuk mendapat persetujuan, tidak satupun yang berasal dari partai politik. Pada umumnya para calon berasal dari kalangan perguruan tinggi dan lembaga swadaya masyarakat (LSM).

Adapun persyaratan untuk menjadi salah satu anggota KPU diantaranya: sehat jasmani dan rohani, berhak memilih dan dipilih, mempunyai komitmen yang kuat terhadap tegaknya demokrasi dan keadilan, memiliki integritas pribadi yang kuat, jujur dan adil, pengetahuan yang memadai tentang politik,

kepartaian, pemilu dan kemampuan kepemimpinan, tidak terikat dalam anggota atau pengurus partai politik, tidak sedang menduduki jabatan politik dan jabatan struktural dalam jabatan pegawai negeri.

Deskriptif Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati 2018 di Kabupaten Pinrang, pasangan calon yang diusung oleh partai politik terdiri dari 4 (empat pasangan) Pasangan suara yang memperoleh suara terbanyak dimenangkan oleh pasangan nomor urut 2 Andi Irwan Hamid dan Alimin atau disingkat dengan Bersama. Bersama memiliki jumlah suara terbesar sebanyak 86.256 atau 44,60 persen dari total pemilih. Kemudian di susul oleh paslon nomor urut 1 Abdul Latif dan Usman Marham dengan raihan suara sebanyak 81.087 atau 39,43 persen dari total pemilih. Pasangan nomor urut 3 Jamaluddin dan Andi Sofyan meraih 37.454 atau 20,21 persen dan yang terakhir disusul oleh paslon nomor urut 4 Hamka Mahmud dan Ahsan Wahid sebesar 8.277 atau 295 persen.

Dari pembahasan di atas bahwa basis suara atau prolehan suara tertinggi dimenangkan oleh pasangan paslon nomor urut 2 sebanyak 86.256 prolehan suara dari 12 kecamatan, adapun jumlah pemilih pemula yang terdaftar dalam pemilihan umum dari 12 kecamatan

sebanyak 38.832 orang dan masing-masing diambil dari umur 17 tahun sampai dengan umur 21 tahun.

Visi dan Misi KPU Kabupaten Pinrang: Visi yaitu Terwujudnya Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara pemilihan umum yang memiliki integritas, provisional, mandiri, transparan dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Misi, a) membangun lembaga penyelenggara pemilihan umum yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum b) penyelenggaraan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif dan beradab, c) meningkatkan kualitas penyelenggara Pemilihan Umum yang bersih, efisien dan efektif, d) melayani dan memperlakukan setiap

Salah satu kategori pemilih yang mempunyai pengaruh besar terhadap kehidupan demokrasi di masa mendatang adalah pemilih pemula, selain jumlahnya yang akan terus bertambah, potensi daya kritis mereka dapat menentukan sebuah hasil pemilu.

Pemilih pemula adalah pemilih yang baru pertama kali menggunakan hak pilihnya, pemilih pemula merupakan masyarakat yang telah memenuhi syarat-syarat seperti berikut: (a) berusia 17 tahun (b) sudah pernah kawin (c) purnawirawa/sudah tidak terikat lagi dalam keanggotaan TNI/kepolisian.

Pengetahuan yang menyangkut tentang pemilihan umum sangat penting bagi pemilih pemula terutama mereka yang memiliki usia 17 tahun.

Disinilah peran KPU sangat penting memberikan kesan awal tentang pentingnya hak suara mereka dalam pemilu bahwa hak suara mereka dapat menentukan siapa pemimpin selanjutnya serta meningkatkan kesejahteraan bangsa dan Negara pemahaman yang baik diharapkan dapat menjadi motivasi untuk terus menjadi pemilih yang cerdas, pemilih pemula lainnya juga mempunyai peran yang penting sehingga diperlukan kebijakan strategis yang memudahkan mereka dalam menggunakan hak pilihnya.

Perbedaan jenis kelamin ini diharapkan tidak menjadi salah satu hambatan bagi pemilih pemula dalam rangka menggunakan hak pilihnya pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2018 dimana setiap warga Negara wajib menentukan pilihannya.

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis menggunakan hasil pemikiran Chandler yang mengatakan terdapat tiga indikator-indikator strategi untuk meningkatkan partisipasi pemilih meliputi: (1) formulasi dan sasaran jangka panjang, (2) pemilihan tindakan, (3) alokasi sumber daya (4) faktor determinan sehingga pemilih pemula tidak ikut dalam partisipasi politik.

Formulasi Dan Sasaran Jangka Panjang

Sebagai komisi pemilihan umum memiliki tugas salah satunya yaitu untuk meningkatkan partisipasi masyarakat terutama dikalangan pemilih pemula Dalam hal ini KPU Kabupaten Pinrang membuat strateginya dengan cara membentuk program Relawanisasi sebanyak 25 orang dan mengadakan beberapa kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat sekaligus mencerdaskan masyarakat pemilih.

Mereka mengadakan beberapa kegiatan diantaranya: sosialisasi dan penyebaran informasi pemilu ke pemula *Go To School*, Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Pemilu ke ibu-ibu Bhayangkari Polres Pinrang di Aula Aspol Pinrang, Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Pemilu yang

melibatkan Relawan Demokrasi berdasarkan segmennya atau kelompoknya masing-masing.

Dapat diketahui bahwa salah satu strategi dari KPU Kabupaten Pinrang adalah adanya program Relawanisasi, karena itu KPU Kabupaten Pinrang dengan segala potensinya dan waktu yang tersedia menggelar sejumlah kegiatan sosialisais sebagai bentuk penyebaran informasi pemilu dan pendidikan politik kepada masyarakat di Bumi Lasinrang.

Pemilihan Tindakan

Pada pemilihan tindakan ini KPU Kabupaten Pinrang melakukan sosialisasi kepada tiga segmen masyarakat dengan menggunakan berbagai metode, diantaranya kepada segmen siswa SMA, masyarakat umum dan Mahasiswa.

Dalam pemilihan tindakan ini panitia-panitia yang terlibat dalam melakukan sosialisasi sudah dibekali pengetahuan oleh anggota KPU, sehingga mereka berusaha secara maksimal untuk meningkatkan partisipasi pemilih tetapi ada beberapa kendala yang dialami pada saat mereka melakukan sosialisasi diantaranya ketika mereka melakukan sosialisasi sebagian masyarakat kurang memahami

dikarenakan faktor usia, dan juga sosialisasi seperti daerah dataran tinggi wilayah utara Kabupaten Pinrang tidak tersentuh dikarenakan jauh dari jangkauan.

Alokasi Sumber Daya

Alokasi sumber daya ini juga berkaitan dengan kemampuan individu atau organisasi dalam melaksanakan suatu kegiatan-kegiatan.

Dari pernyataan ini pemahaman terkhusus pada relawan demokrasi yang dibentuk kemarin kurang pemahaman terhadap tugas dan fungsinya, tentunya dalam hal ini akan mempengaruhi keterlambatan dalam menyelesaikan pekerjaan.

Dengan adanya masalah seperti ini KPU Kabupaten Pinrang dengan upayanya memberikan bimtek dan mengadakan briefing setiap seminggu sekali ini adalah salah satu upaya mereka tetapi alangkah baiknya lagi jika dilakukan lebih rutin agar mereka dapat memahami secara cepat.

Faktor determinan sehingga pemilih pemula tidak ikut berpartisipasi pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2018 di Kabupaten Pinrang salah satu diantaranya:

Kesadaran politik warga Negara menjadi factor determinan dalam partisipasi politik masyarakat, artinya sebagai warga Negara yang baik memiliki pengetahuan dan kesadaran akan hak dan kewajibannya yang berkaitan dengan lingkungan masyarakat, dan kegiatan politik menjadi tolak ukur seseorang terlibat dalam proses partisipasi politik, begitu juga dengan pemilih pemula yang baru memasuki usia hak pilih untuk menentukan kemana mereka harus memilih. (a). Kesibukan sehari-hari Pemilih pemula umumnya mereka berstatus pelajar, mahasiswa dan pekerja, sangat wajar bagi para pemilih pemula yang rata-rata memiliki umur 17-21 tahun. Salah satu hal yang membuat para pemilih pemula enggan melakukan kegiatan politik karena menyita waktu yang banyak tentunya ini menjadi alasan bagi para pelajar dan pekerja. Dan ini merupakan sikap apatis Sikap apatis dalam kamus besar yaitu acuh tak acuh atau bermasa bodoh, adapun hal yang lain diketahui bahwa sebagian dari mereka sudah tidak percaya lagi

terhadap janji-janji yang dikatakan para caleg dikarenakan mereka menganggap hal tersebut Cuma janji dan tidak akan dilaksanakan (b). Pengaruh Dari Lingkungan Keluarga, Pihak keluarga adalah faktor yang berpengaruh besar dalam kehidupan seseorang, pihak keluarga dapat mendukung bahkan menentang perilaku anggota keluarganya yang lain jika salah satu dari mereka tidak mendukung.

Melihat dari beberapa jawaban informan mereka ikut berpartisipasi tetapi dalam hal menentukan pilihannya mereka mengikuti sesuai pilihan dari keluarganya bahkan juga mereka memilih calon legislative dikarenakan ada hubungan kekeluargaan partisipasi tersebut dapat dikatakan sebagai partisipasi yang ikut-ikutan. Mengapa dikatakan demikian karena mereka belum mampu melihat bagaimana calon pemimpin yang baik, sehingga mereka mudah mendapatkan pengaruh dari lingkungan dan tempat tinggal mereka.

Perilaku pemilih pemula ini mudah diintimidasi, khususnya dalam menetapkan pilihannya pada pemilih sebagaimana sifat mereka yang sangat rentang dan masih labil, (c) Perasaan Tidak Mampu, Perasaan minder ini biasanya disebabkan oleh tingkat pendidikan yang rendah atau tingkat

social ekonomi yang rendah, mereka merasa tidak berhak untuk tampil dalam kegiatan politik, karena mereka menyadari bahwa kenyataan yang ada dalam masyarakat politik lebih berhak bagi mereka yang punya punya pengalaman, hal ini disebabkan karena sebagian dari pemilih pemula yang ada di Kabupaten Pinrang tidak tersentuh atau tidak mendapat pendidikan politik sejak dini dan juga hal ini disebabkan karena Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang juga kurang dalam memberikan bimbingan pendidikan pemilu terutama pada mereka yang tidak memiliki pendidikan sehingga sebagian dari mereka merasa tidak mampu untuk ikut serta dalam kepanitiaan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2018 di rumuskan beberapa kesimpulan sebagai berikut: 1). Strategi Komisi pemilihan umum dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2018 di Kabupaten Pinrang pertama tahap formulasi dan sasaran jangka panjang tahap ini sudah menunjukkan bahwa adanya kejelasan

rencana sosialisasi yang ditetapkan oleh KPU seperti mereka membuat program relawan demokrasi yang beranggotakan 25 orang program ini dibuat dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat sekaligus mencerdaskan masyarakat pemilih, yang kedua tahap pemilihan tindakan pada tahap ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang melakukan sosialisasi kepada tiga segmen pemilih diantaranya kepada Siswa SMA, masyarakat umum dan Mahasiswa dengan metode sosialisasi berupa tatap muka dan menggunakan media massa, dan yang ketiga alokasi sumber daya tahap ini sudah menunjukkan sudah dilaksanakan kegiatan peningkatan sumber daya berupa bimbingan teknis kepada seluruh relawan demokrasi yang akan turun melakukan sosialisasi. 2). Faktor determinan sehingga pemilih pemula tidak ikut serta dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2018 di Kabupaten Pinrang hal ini terlihat dari hasil wawancara pembahasan di atas pertama, kesibukan sehari-hari yang dialami oleh sebagian pelajar yang lebih memfokuskan dirinya hanya sebagai pelajar saja sehingga acuh terhadap hak dan kewajibannya sebagai warga Negara yang baik, kedua pengaruh dari lingkungan keluarga yakni mereka memilih kandidat dan menjatuhkan

pilihannya sesuai dengan pilihan keluarganya dan juga melihat dari calon kandidat yang mereka dukung memiliki hubungan kekeluargaan, dan ketiga perasaan tidak mampu yang dialami oleh sebagian orang yang mengatakan bahwa ikut berperan dalam kegiatan politik hanya dilakukan oleh orang-orang yang memiliki pendidikan

DAFTAR PUSTAKA

- Effendi, O. U. (2016). Ilmu Komunikasi Dan Praktek. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Erfiza. (2012). Political Explore Sebuah Kajian Ilmu Politik. Bandung: Alfabeta.
- Firman. (2014). Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik. Ilmu Pemerintahan. Universitas Muhammadiyah Makassar. Makassar.
- Gleko, P. dkk. (2017). Stategi Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah. Ilmu Social Ilmu Politik. Vol. 6 No. 1. Unitri.
- Huntington Samuel P. dan Joan Nelson. 1990. *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*. Jakarta: Rineka Cipta.
- J. Salusu. 2015. *Pengambilan Keputusan Strategi Untuk Organisasi Publik dan Organisasi Nonprofit*. Jakarta: Grasindo.
- Kaelola, Akbar. 2009. *Kamus Istilah Politik Kontemporer*. Yogyakarta: Cakrawala.
- Nugroho Agung. 2018. *Strategi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi*

*Dalam Peningkatan Partisipasi
Pemilih di Kabupaten Kerinci.*
Universitas Lampung.

Supriyono, Arifin. 2014. *Mendongkrak
Partisipasi Pemilu di Indonesia.*
Perludem.

Surbakti, Rahman. 2007. *Memahami
Ilmu Politik.* Jakarta: Gramedia
Widia Sarana Indonesia.